

ANALISIS NORMALISASI HUBUNGAN ARAB SAUDI DENGAN QATAR TAHUN 2021

Afif Notodewo¹, Yon Machmudi²
Universitas Indonesia

* Email: [1afifnotodewo@gmail.com](mailto:afifnotodewo@gmail.com), [2yonmachmudi01@gmail.com](mailto:yonmachmudi01@gmail.com)



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>
VOL. 3, NO. 2 (2022)

Page: 56 – 69

Recommended Citation (APA Style):

Notodewo, Afif, dan Yon Machmudi. 2022. "Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3(2): 56–69. DOI: <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i2.26748>.

Available at:

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/26748>

Article History:

Received 13 Juni 2022

Accepted 05 Juli 2022

Available online 14 Desember 2022

* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. Saudi Arabia and its ally, UAE (United Arab Emirates), Bahrain, and Egypt decided to end their diplomatic relations with Qatar and at the same time blockade Qatar through land, sea, and air in 2017. Saudi and its ally deemed that Qatar's relations and proximity with Iran and Turkey threaten their existence in the Gulf. But, there are political changes between Saudi and its ally with Qatar in 2021 which is marked by cooperation among them. This research will disclose the main reason why Saudi and Qatar decided to normalize their relationship which there are diplomatic changes in both states. This research uses grand theory neorealism and its middle theory relative gain and prisoner's dilemma as analytical tools. As the result, there is a struggle for hegemony and geopolitical between Saudi Arabia, Iran, and Turkey in the Middle East and add with political change in the United States of America in which Joe Biden come to power and the spreading of Covid 19.

Keywords: Saudi Arabia, Qatar, Neorealism, Relative Gain, Prisoner's Dilemma.

Abstrak. Arab Saudi beserta aliansinya, yaitu UEA (Uni Emirat Arab), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar serta melakukan blokade jalur darat, air, dan udara pada 2017. Saudi dan aliansinya menganggap kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki yang mengancam eksistensi mereka di kawasan Teluk. Namun, pada 2021 dunia dikagetkan dengan normalisasi hubungan antara kedua belah pihak ditandai dengan kerjasama. Penelitian ini membahas alasan mengapa Saudi dan Qatar melakukan normalisasi hubungan? Penelitian ini menggunakan kacamata *grand theory neorealisme* beserta *teori relative gain* dan *prisoner's dilemma*. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat perebutan hegemoni antara Saudi, Iran, dan Turki. Serta kondisi yang tidak menguntungkan Saudi seperti terpilihnya Joe Biden dan merebaknya pandemi Covid 19.

Kata Kunci: Arab Saudi, Qatar, Neorealisme, Relative Gain, Prisoner's dilemma.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Qatar yang sempat dilanda krisis diplomatik pada 2017. Sebelumnya, 2017 merupakan tahun yang sulit di kawasan Teluk yang mana telah terjadi krisis diplomasi antara Qatar dan anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*). Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA (Uni Emirat Arab), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang tentu membuat perubahan geopolitik di kawasan Teluk. Bukan tanpa alasan, anggota GCC mengutuk kebijakan Qatar yang diduga mendanai organisasi ekstrimis seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hamas, dan Hezbollah. Selain itu, anggota GCC juga mengutuk kedekatan Qatar dengan Iran yang mana membahayakan keamanan di kawasan. Mendengar hal ini, pihak Qatar mengelak dengan menyatakan tidak pernah mendanai organisasi ekstrimis dan teroris.

Terdapat 3 poin utama yang menyebabkan GCC yang dipimpin oleh Saudi menyatakakan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Pertama, Saudi dan anggota GCC lainnya mengecam dukungan dana yang diberikan Qatar terhadap afiliasi dari IM. IM merupakan salah satu organisasi yang menjadi sorotan pascaterjadinya peristiwa *Arab Spring* pada 2011. Perlu dijelaskan kembali, IM merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Hasan al Bana pada 1928. Organisasi berasal dari Mesir dan memiliki banyak afiliasi di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah. Meskipun bukan peran utama pada peristiwa Arab Spring, IM mampu memanfaatkan situasi dalam menguatkan pengaruh politiknya. Di Tunisia, IM melalui afiliasinya, partai Ennahda berhasil dalam menguasai kursi di parlemen Tunisia. Di Libya, IM juga memiliki pengaruh besar dalam panggung perpolitikan dengan berafiliasi dengan NFA (*National Force Alliance*) dan Partai Keadilan dan Konstruksi. Sedangkan di Mesir, Mohammed Morsi yang merupakan tokoh besar dari IM terpilih menjadi presiden Mesir pada 2012 (Gordon, 2017).

Saudi dan aliansinya melihat IM sebagai ancaman terhadap eksistensinya. Mereka melihat IM sebagaimana melihat organisasi Islam ekstrimis yang mereka pernah hadapi. Saudi beserta koalisinya melihat pola bahwa partai politik yang tidak mendapatkan tempat dan cenderung lemah cenderung untuk mendukung IM dengan alasan persamaan ideologi dan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan yang lebih tinggi. Hal ini cukup dimaklumi karena politik Islam merupakan alat yang cukup efektif untuk menggapai dukungan dalam komunitas internasional yang tentu dapat menentang *status quo* yang ada, salah satunya adalah rezim monarki kerajaan Saudi dan koalisinya. Saudi juga melihat Qatar sebagai kekuatan yang baru untuk

menggantikannya sebagai pemimpin di kawasan Teluk. Qatar menggunakan Al Jazeera sebagai media untuk menyebarkan pemikiran dan pengaruh dari IM (Gordon, 2017).

Keaktifan IM dalam perpolitikan di Timur Tengah menjadi sorotan bagi Saudi karena bertentangan dengan kepentingan Saudi. Negara-negara di Timur Tengah merespon hal itu menjadi bipolaritas. Turki dan Qatar adalah pihak yang mendukung gerakan IM. Sedangkan, Saudi, UEA, dan Mesir merupakan pihak yang melarang kehadiran dan pergerakan dari IM semenjak kudeta dan pembentukan pemerintahan baru di Mesir pada 2013. Saudi mempengaruhi aliasinya, yaitu UEA, Mesir, dan Bahrain untuk menjadikan IM sebagai salah satu organisasi teroris dan dilarang pergerakannya di kawasan. Lebih dari itu, Saudi dan aliansinya tidak hanya fokus kepada IM saja, melainkan juga waspada terhadap kehadiran kebangkitan Turki dan Qatar yang didukung oleh IM di Timur Tengah. Fenomena ini menjadi titik awal dari memburuknya hubungan antara Saudi dan Qatar pada 2017.

Poin yang kedua, Saudi dan aliansinya mengecam kedekatan hubungan Qatar dengan Iran yang mana mereka melihatnya sebagai ancaman untuk keamanan dan eksistensi mereka di Kawasan. Pada dekade terakhir ini, Qatar menunjukkan kedekatan kepada Iran dengan ikut memvoting dalam melawan putusan resolusi UNSC (*United Nations Security Council*) dalam menghentikan program pengembangan nuklir Iran dan perjanjian bilateral perihal *counterterrorism* dengan Iran. Setelah itu, kesultanan Qatar merupakan salah satu (selain Oman) dari negara Teluk yang memberikan selamat kepada presiden Qatar-Hassan Rouhani-atas terpilihnya kembali sebagai presiden Iran. Berdasarkan *Financial Times*, Qatar dianggap pernah mengganggu keamanan di kawasan Teluk dengan mengizinkan otorisasi pembayaran sebesar 700 juta Dollar ke Iran, *Kata'ib al Hezbollah*, milisi Syiah-*di back up Iran*-di Iraq, dan kepada anggota keluarga kerajaan Qatar yang ditawan di Iraq. Terakhir, pemerintah Qatar dianggap memberikan kritik terhadap kawasan Teluk dan kebijakan AS mengenai kebijakannya terhadap Iran.

Ketiga, mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump merupakan salah satu faktor pendukung kebijakan Saudi dan aliansinya dalam fenomena krisis Qatar pada 2017. Kunjungan pertama Trump ke Arab Saudi dibaca oleh pemerintah Saudi, UEA, dan Mesir sebagai lampu hijau dalam memberikan sanksi terhadap Qatar. Dalam pertemuan tersebut, Trump membahas mengenai komitmen Saudi dan aliansinya dalam menghadapi ancaman Iran dan melawan organisasi Islam radikal. Selain itu, dalam twitternya, Trump pernah berargumen mengenai blokade yang dilakukan Saudi dan aliansinya dengan

membenarkan apa yang dilakukan Qatar dalam mendanai organisasi teroris dengan melabelinya sebagai "*high-level funders of terrorism*". Pernyataan Trum tersebut membuat Saudi dan koalisinya percaya diri mengenai kebijakannya dalam memblokade Qatar (Gordon, 2017).

Tepat pada sebulan berikutnya setelah peristiwa pemutusan diplomatik, pada Juli 2017 Saudi dan aliansi GCC memberikan kesempatan kepada Qatar untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Namun, mereka melontarkan 13 ultimatum kepada Qatar, yaitu (1) membatasi hubungan diplomatik dengan Iran dan menghentikan segala bentuk kerjasama militer dengan Iran, (2) memutuskan hubungan dengan organisasi teroris, terutama Ikhwanul Muslimin, Al Qaida, dan Hezbollah. (3) menutup media Al Jazeera dan segala bentuk afiliasinya. (4) Menutup outlet berita yang didanai Qatar, di antaranya *Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, dan Middle East Eye*. (5) mengakhiri kerjasama dan keberadaan militer Turki di Qatar. (6) berhenti untuk membiayai segala bentuk organisasi yang dianggap terori. (7) menyerahkan figur yang selama ini dianggap sebagai teroris. (8) mengakhiri gangguan yang terjadi dalam internal Qatar. (9) menghentikan segala bentuk hubungan dengan pihak oposisi dari Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain. (10) mengganti rugi segala bentuk kerugian dan kompensasi yang diakibatkan oleh kebijakan Qatar. (11) Menyetujui untuk dilakukan audit pada tahun pertama. (12) beraliansi dengan negara arab dan Teluk lainnya dalam bentuk militer, politik, sosial, dan ekonomi. (13) terakhir, Qatar harus menyetujui persyaratan ini dalam tempo 10 hari (Wintour, 2022).

Saudi dan aliansinya menuntut Qatar untuk memenuhi persyaratan tersebut dalam kurun waktu 10 hari. Namun, Qatar memutuskan untuk tidak mengindahkan seruan dari Saudi dan aliansi GCC-nya karena dianggap sebagai hinaan kepada kedaulatan Qatar. Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani mengatakan tidak akan melakukan negosiasi mengenai ekonomi, diplomatik, dan travel jika aliansi Saudi belum memperbaiki hubungannya dengan Qatar (Maclean, 2022). Atas keputusan Qatar tersebut, hubungan antara Qatar dan GCC semakin memburuk dengan dilakukannya blokade pihak GCC terhadap Qatar yang mencakup darat, laut, dan udara.

Dampak yang terjadi akibat blokade anggota GCC pada Qatar tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal ini karena Qatar mendapat bantuan dari Iran dan Turki dalam membantu menanggulangi dampak yang terjadi. Namun, Qatar tetap mendapatkan dampak dari blokade tersebut terutama pada sektor ekspor-impur, penerbangan, dan perbankan. Dari segi ekspor-impur, persentasi impur Qatar yang jatuh sebesar 40% dari sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sebelum

kejadian ini, Qatar mengimpor sebesar 80% suplai makanan kepada negara-negara Teluk dan Qatar hanya memproduksi suplai sekitar 1% (Wahyuni, 2017). Dari segi penerbangan, Qatar Airways terpaksa menutup 18 rute penerbangannya, dari segi perbankan Qatari Bank mengalami penurunan *non resident* sebesar 12,8 USD. Dengan adanya blokade tersebut, Qatar Airways harus mencari rute baru untuk tujuan Afrika dan Eropa sehingga mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada Qatar Airways, melainkan juga terjadi pada pesawat di negara Teluk lainnya seperti *Egypt Air, FlyDubai, Gulf Air, Air Arabia, Etihad Airlines, Royal Air Maroc*, dan *Saudi Arabian Airlines* yang tidak dapat beroperasi ke (Wahyuni, 2017). Selain itu, dampak embargo juga berpengaruh masyarakat Qatar yang dideportasi dari negara anggota GCC lainnya. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada Qatar, melainkan juga Saudi dan anggota GCC lainnya. Sebanyak kurang lebih 100.000 masyarakat Mesir yang tinggal dan bekerja di Qatar terjebak di Qatar. Mereka tidak dapat memesan tiket perjalanan untuk pulang dan tidak mendapatkan izin dokumen dari pemerintah Qatar (Wahyuni, 2017).

Setelah 3 tahun Saudi dan aliansinya melakukan blokade terhadap Qatar, pada 2022 menjadi titik balik hubungan diplomatik di kawasan Teluk, yaitu normalisasi hubungan antara Saudi dan aliansinya dengan Qatar. Sehari sebelum jadwal pertemuan GCC Summit yang ke 41, petinggi Saudi dan UEA mengumumkan bahwa petinggi Qatar akan menghadiri pertemuan GCC tersebut (Taneja, 2021). Terdapat peran Kuwait salah satu anggota GCC yang menjadi mediator di antar kedua belah pihak. Keesokannya, Pemerintah Qatar, Sheikh bin Hamad al Thani mendarat di Al Ula dan langsung disambut oleh Mohammed bin Salman (MBS). Hasil dari pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhad menyampaikan bahwa hubungan kedua negara sudah kembali normal serta Saudi mengesampingkan perbedaan yang selama ini menyebabkan konflik (BBC, 2022).

Dengan kembali normal hubungan kedua negara, maka Saudi kembali membuka jalur darat, laut, dan udara yang selama 3 tahun diblokade. Situasi di kawasan juga kini sudah kembali normal dan membaik. Perbatasan darat antara Saudi dan Qatar sudah kembali dibuka. Bandara juga sudah kembali normal dan beroperasi dan begitu pula dengan perbatasan laut antara Qatar dengan Saudi, UEA, dan Bahrain. Bebas visa juga telah diterapkan kepada penduduk di kedua belah pihak yang menjadi bagi perbaikan ekonomi. Penelitian ini menitikberatkan kepada pernyataan di atas mengenai mengapa Saudi melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar pada 2021? Melihat perbedaan kebijakan Saudi sebelumnya

yang bertolak belakang dengan melakukan blokade terhadap Qatar.

Dalam menganalisis mengapa Arab Saudi merubah kebijakannya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar, penelitian ini menggunakan grand theory neorealisme dengan turunannya, yaitu *relative gain* dan *prisoner'dilemma* sebagai pisau analisis. Pertama, neorealisme merupakan perkembangan dari realisme klasik dan neoklasik yang diperkenalkan oleh Kenneth Waltz pada 1979 dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics*. Poin yang diambil oleh Waltz ialah mengenai struktur internasional yang anarki dan *distribution of power*. Namun, Waltz mengabaikan peran sifat manusia dan etika kenegaraan yang mana merupakan aspek penting dalam realisme klasik. Waltz menekankan bahwa struktur internasional yang anarki merupakan faktor yang membuat negara melakukan tindakan. Dengan pernyataan ini, Waltz berasumsi bahwa tindakan atau kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hal yang dapat dianalisa dan prediksi.

Di samping perbedaan budaya, ideologi, dan konstitusi, setiap negara pada dasarnya menjalankan fungsi dasarnya. Waltz mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut dan lebih memfokuskan pada kapabilitas power pada setiap negara. Struktur suatu sistem berubah seiring dengan perubahan dalam distribusi kapabilitas antar unit-unit sistem. Anarki internasional dan kapabilitas negara-negara yang berbeda menghasilkan pada perimbangan kekuatan atau dikenal dengan istilah "*balance of power*". Waltz tidak memberikan peran pada kebijakan eksplisit bagi para pemimpin negara, hal ini disebabkan mereka tidak memiliki pilihan karena dibatasi oleh struktur internasional yang membatasi mereka untuk bergerak. Selain itu, Waltz juga berasumsi bahwa konflik dan perang merupakan hal yang tidak terelakan dalam Hubungan Internasional.

Waltz menekankan peran negara besar yang menjadi faktor penting dalam menentukan perubahan-perubahan dalam struktur sistem internasional. Sementara itu, negara-negara yang memiliki kapabilitas *power* yang relatif kecil akan melakukan *balancing* dibandingkan *bandwagon*. Pada dasarnya, *balancing* dan *bandwagon* memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keamanan. Pada realisme klasik, negara lemah lebih cenderung melakukan sebaliknya, yaitu *bandwagon* dibandingkan *balancing*. Perbedaannya, *bandwagon* cenderung digunakan oleh negara lemah untuk memperoleh kelestarian negara dan mendapatkan keuntungan, sedangkan *balancing* digunakan untuk menghindari kerugian (Schweller, 2004).

Mengenai hal ini, Waltz menekankan pada sistem bipolar lebih stabil dibandingkan dengan sistem multipolar dalam menjamin perdamaian dan keamanan. Sistem bipolar didefinisikan sebagai dua

kekuatan dominan yang juga terdiri dari negara lemah yang beraliansi kepada kedua kubu tersebut. Sistem bipolar mengacu kepada dua kekuatan besar pada era musim dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menciptakan *balance of power*, yaitu perimbangan kekuatan dua negara dengan kapabilitas *power* yang besar. Sedangkan, sistem multipolar mengacu kepada pascaperang dingin yang mana terdapat lebih dari dua kekuatan besar yang berpartisipasi dalam Hubungan Internasional. Waltz berasumsi bahwa perang dingin merupakan periode stabilitas dan perdamaian internasional.

Konsep kepentingan nasional juga menjadi salah satu faktor yang menentukan tindakan dan kebijakan luar negeri suatu negara. Negara merupakan aktor yang rasional di mana mereka akan menjalankan cara terbaik dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Terdapat perbedaan antara realisme klasik dan neorealisme dalam memandang kepentingan nasional. Realisme klasik memandang kepentingan nasional sebagai petunjuk dasar para pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri yang dapat dipertanggung jawabkan. Bagi para kaum neorealisme, kepentingan nasional bergerak secara otomatis yang memeritahkan para pemimpin negara kapan dan ke mana harus bertindak. Perbedaannya, kaum realisme klasik yang diperkenalkan oleh Morgenthau menganggap peran pemimpin negara dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu kepada kepentingan nasional dan mereka akan dipersalahkan ketika gagal melakukannya. Sedangkan, kaum neorealisme tidak memperhatikan peran dari pemimpin atau decision maker suatu negara karena mereka akan melakukannya secara otomatis karena digerakan oleh atas respon dan dikte dari sistem internasional.

Kedua, turunan dari neorealisme, yaitu *relative gain* yang membahas mengenai kooperasi dalam Hubungan Internasional memperdebatkan antara *absolute gain* dan *relative gain*. *Absolute gain* dipreferensikan oleh neoliberal institusionalisme, sedangkan *relative gain* dipreferensikan oleh neorealisme. Kaum neoliberalisme berasumsi bahwa pertukaran ekonomi di pasar merupakan *positive-sum game* yang menekankan bahwa setiap aktor mendapatkan keuntungan lebih dari yang mereka tanamkan. Kaum neoliberalisme juga menolak *zero-sum game* yang dipreferensikan oleh kaum neorealisme di mana keuntungan ekonomi suatu negara merupakan kerugian ekonomi bagi negara lain. Dengan kata lain, menurut neoliberal institusionalisme kooperasi dan kerjasama antar aktor Hubungan Internasional adalah sangat mungkin terjadi. Namun sebaliknya, menurut neorealisme kooperasi dan kerjasama sangat sulit untuk terwujud (Snidal, 1991).

Dalam struktur internasional yang anarki, fokus negara tidak pada seberapa besar keuntungan atau

kerugian yang mereka peroleh, melainkan fokus mereka ialah terhadap bagaimana keuntungan atau kerugian yang mereka dapat dibandingkan dengan negara lain. Tentunya, dalam kerjasama internasional tentu terdapat pihak yang lebih diuntungkan dan terdapat pula pihak yang lebih dirugikan. Teori ini juga diambil dan dikembangkan dari teori ekonomi politik Internasional, yakni merkantilisme pada abad ke 16 dan 17. Asumsi dari merkantilisme adalah aktivitas ekonomi tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat, serta menyatakan bahwa ekonomi merupakan alat dan bentuk dasar dari politik. Sehingga, keuntungan yang diperoleh negara lain merupakan kerugian bagi negara lainnya (Snidal, 1991).

Asumsi dari merkantilisme tersebut kemudian diambil oleh Kenneth Waltz yang kemudian dikenal sebagai *relative gain*. Waltz pernah membahas mengenai *relative gain* dalam bukunya *Theory of International Politics* dengan menyatakan (Waltz, 1979).

"Ketika negara menghadapi situasi kerjasama yang saling menguntungkan, mereka akan fokus pada pertanyaan bagaimana keuntungan tersebut akan dibagi. Namun, letak pertanyaannya bukan pada 'akankah kerjasama ini saling menguntungkan?' tetapi lebih kepada 'siapakah yang akan mendapatkan keuntungan lebih besar?' Negara yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar akan memanfaatkannya untuk melukai dan menghancurkan negara yang mendapatkan keuntungan lebih sedikit."

Dari pernyataan Waltz, menurutnya negara lebih cenderung kepada *relative gain* yang juga menjelaskan mengapa kerjasama menjadi sulit untuk terwujud. Maksud dari '*gain*' yang dibahas oleh Waltz adalah ekonomi yang ditransformasikan menjadi *security*. Dengan kata lain, ekonomi dan *security* menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Snidal, 1991).

Terakhir, *Prisoner's dilemma* merupakan salah satu dari *game theory* dalam studi Hubungan Internasional. *Game Theory* mulai digunakan sebagai alat analisis pada abad pertengahan untuk membantu penentu kebijakan dalam memilih opsi. *Game Theory* merupakan teori yang digunakan dalam menjelaskan konflik dan kerjasama dalam Hubungan Internasional. Negara merupakan aktor yang rasional dalam menentukan tindakan dan kebijakannya guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, negara selalu memilih keputusan yang rasional dalam menentukan kebijakannya. *Game Theory* digunakan untuk menjelaskan decision-making process tersebut. Teori ini membantu penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan yang optimal dan rasional untuk negaranya. Dalam menentukan kebijakan yang optimal dan rasional, *game theory* ini mempertimbangkan penggunaan matematika dalam menganalisis (Alawahrer, 2021).

Prisoner's dilemma merupakan salah satu bentuk dari *game theory* dan dapat digunakan oleh berbagai bidang lain. Dalam studi Hubungan Internasional, Teori ini digunakan sebagai proses pengambilan keputusan oleh *decision-maker* yang mana hasil keputusannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya oleh negara lain yang juga mencari tindakan terbaik untuk negaranya. Teori ini membantu para *decision-maker* dalam mengambil keputusan yang rasional dalam sistem internasional yang anarki. *Prisoner's dilemma* digunakan untuk mengambil keputusan terbaik untuk menanggulangi '*loss*' dan mendapatkan '*gain*' semaksimal mungkin dari kondisi yang ada. Tentu dengan *prisoner's dilemma* kita dapat melihat dan menganalisa peraduan strategi dua negara atau lebih dalam menentukan kebijakan yang rasional dalam sistem internasional.

Teori *prisoner's dilemma* menganalogikan sebagai dua kriminal yang ditangkap oleh polisi secara bersamaan dan interogasi di ruangan terpisah. Setiap tahanan tersebut diinterogasi sebagai saksi atas perilaku kriminal lainnya. Setiap sikap dan pengakuan dari masing-masing pelaku kriminal tersebut akan mendapatkan *reward* yang berbeda. Peraturannya, jika masing-masing pihak bersaksi atas perbuatan tahanan lainnya, maka ia diberikan *reward* untuk bebas dengan catatan tahanan lain tidak bersaksi atas perbuatannya. Kemudian, jika kedua tahanan saling bersaksi perbuatan satu sama lain maka keduanya akan diberikan penalti 5 tahun penjara. Lalu, jika kedua belah pihak diam maka masing-masing hanya diberikan hukuman 3 tahun penjara. Terakhir, jika salah satu dari tahanan tersebut bersaksi atas perbuatan tahanan lainnya maka ia akan bebas, namun tahanan lainnya diberikan hukuman lebih berat, yaitu 10 tahun penjara (Alawahreh, 2021).

Para pelaku kriminal hanya mempunyai empat pilihan, yaitu (1) mengaku di mana para pelaku lainnya diam, (2) saling tetap diam antara satu sama lain (bekerjasama), (3) saling mengakui perbuatan satu sama lain (membelot), (4) tetap diam di mana para pelaku kriminal mengaku. Setiap negara akan menentukan pilihannya baik kerjasama atau konflik. Jika memilih untuk bekerjasama, maka tiap negara akan mendapat hukuman yang lebih ringan. Namun, negara tersebut harus tetap waspada terhadap tindakan negara lain yang akan berpengaruh pada keamanannya. Setiap pertimbangan tersebut tentu dipikirkan oleh *decision-maker* setiap negara secara rasional untuk memaksimalkan profit dan mengurangi kerugian (Burchill, 2005).

METODE

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis normalisasi hubungan antara

Arab Saudi dan Qatar tahun 2021 adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menggambarkan interaksi dan perilaku sosial sehingga penelitian ini bersifat dinamis tanpa dibatasi oleh variabel tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menggali makna, proses, serta konteks dari perilaku dan fenomena sosial yang diamati. Metode penelitian kualitatif mengacu kepada penelitian interpretatif sehingga mampu dalam menjabarkan pemahaman dari fenomena sosial, khususnya yang melatarbelakangi peristiwa normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar. Sumber data penelitian ini menyajikan dari beragam sumber, seperti buku, jurnal, dan media digital yang terpercaya.

HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini menjawab mengenai mengapa Arab Saudi melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar pada 2021. Padahal, sebelumnya Saudi merupakan aktor yang paling gencar dalam memelopori blokade ekonomi terhadap Qatar kepada aliansinya, seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka berpikir neorealisme beserta turunannya seperti teori *balance of power*, *relative gain*, dan *prisoner's dilemma* digunakan sebagai pisau analisis. Ketiga teori di atas dapat menjelaskan fenomena yang terjadi antara Saudi dan Qatar.

Sub-bab ini berjudul "*balance of power* terhadap hegemoni Iran dan Turki serta strategi *Prisoner's dilemma* dan *Game Theory* yang diterapkan Saudi" menjelaskan mengenai strategi Saudi dalam menyeimbangkan kapabilitas *power* milik Qatar yang disupport oleh kekuatan eksternal, yaitu Iran dan Turki yang mengambil kesempatan dalam kesempitan perihal krisis yang terjadi di kawasan Teluk. Inisiatif Saudi dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar digerakan oleh sistem internasional yang anarki seperti yang diperkenalkan oleh Kenneth Waltz sebagai *balance of power*. Strategi Qatar dalam menghadapi blokade mengejutkan Saudi dan GCC dengan menghadirkan Iran dan Turki. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pendeskripsian *prisoner's dilemma* dan *relative gain* sebagai jalan terbaik bagi Saudi adalah dengan melakukan normalisasi dengan Qatar untuk mengurangi hegemoni Iran dan Turki di kawasan Teluk.

Penerapan Neorealisme dalam normalisasi Saudi-Qatar: *Balance of Power* terhadap Hegemoni Iran dan Turki serta Strategi *Prisoner's Dilemma* dan *Game Theory* yang diterapkan Saudi

Power memiliki peranan yang besar bagi kaum neorealisme dalam memandang fenomena Hubungan Internasional. Waltz mendefinisikan

power meliputi besarnya populasi, teritorial, sumber daya alam, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, dan kestabilan politik. Dalam sistem internasional yang anarki, negara melakukan *struggle for power* untuk bertahan hidup. Tentu, negara yang memiliki *power* yang besar lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara yang hanya memiliki *power* yang lebih kecil (Waltz, 1979). *Struggle for power* ini kemudian menjadi acuan terhadap *teori balance of power*. Teori ini dapat juga didefinisikan sebagai terdapat 3 kekuatan besar yang menghegemoni sistem internasional. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi *balance of power* dalam krisis hubungan antara Saudi dengan Qatar serta strategi *prisoner's dilemma* dan *game theory* yang diterapkan Saudi.

Berdasarkan 13 ultimatum Saudi yang ditunjukkan kepada Qatar, terdapat poin yang menarik yang terdapat pada poin 1 dan 5. Isi dari kedua poin tersebut adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan melarang kehadiran militer Turki di wilayah Qatar yang sedang melakukan kerjasama dalam bentuk latihan militer. Dengan pernyataan tersebut, Saudi dan anggota GCC lainnya terganggu dengan kehadiran Iran dan Turki di kawasan Teluk. Semenjak hubungan Saudi dan aliansinya dengan Qatar memburuk, Qatar melakukan pendekatan terhadap Iran dan Turki. Hal ini lah yang membuat blokade dari anggota GCC tidak terlalu berdampak ke Qatar karena mendapat bantuan dari Iran dan Turki. Dengan kata lain, Iran dan Turki memiliki *power* yang besar sehingga kehadirannya membuat Saudi dan aliansinya merasa *insecure*. Seperti asumsi dari Kenneth Waltz bahwa kapabilitas *power* yang dimiliki suatu negara akan berdampak pada negara lain (Waltz, 1979).

Sekarang kami perlihatkan mengenai perbandingan kapabilitas *power* yang dimiliki oleh Iran, Turki, dan Saudi. Nantinya, perbandingan ini akan menjelaskan Iran dan Turki sebagai akar dari jawaban atas kebijakan Saudi untuk mau melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar. Dalam mengestimasi "*power*", artikel ini mengacu kepada asumsi Kenneth Waltz yang mendefinisikan *power* meliputi besarnya populasi, teritorial, sumber daya alam, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, dan kestabilan politik. Pertama, Iran merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di Timur Tengah dengan populasi yang berjumlah 86.022.837 jiwa, berkat hal tersebut Iran merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di Timur Tengah. Berdasarkan luas teritorial, Iran memiliki luas sebesar 1.648.000 km². Sementara itu, produksi minyak dan gas Iran berkisar 4.250.000 barrel pada 2022. Perlu diketahui, cadangan minyak dan gas Iran diperkirakan mencapai 157.200.000.000 barrel pada 2022 yang mana merupakan jumlah cadangan minyak dan gas

terbanyak nomor dua setelah Saudi (Globalfirepower, 2022).

Dari aspek militer, jika dilihat dari jumlah personil militer, jumlah dan kecanggihan alutsista, dan industri pertahanan lokal, dilansir dari Global Fire Power termasuk dalam urutan 14 dari 142 negara di seluruh dunia (Globalfirepower, 2022). Pada 2022, jumlah budget yang disediakan oleh pemerintah Iran untuk aspek militer berjumlah 5 milyar USD. Jumlah pasukan militer siap tempur berjumlah 1.015.000 personil. Dari segi angkatan udara, pesawat tempur yang dimiliki Iran berjumlah 543 unit. Pada angkatan darat, jumlah Tank yang dimiliki berjumlah 2.831 unit, artileri 1.030, dan roket berjumlah 2.485. Dan, dari segi angkatan laut total yang dimiliki Iran berjumlah 142 unit (Globalfirepower, 2022). Perlu digaris bawahi bahwa Iran memiliki nuklir hasil peninggalan dari AS pada rezim Reza Pahlevi. Semenjak runtuhnya rezim tersebut, nuklir Iran berada di bawah kontrol Republik Islam Iran. Mengenai detail jumlah dan klasifikasi nuklir Iran belum diketahui karena pemerinah Iran melarang segala bentuk inspeksi internasional mengenai program nuklir yang dimilikinya (The Guardian, 2021).

Kedua, selanjutnya kami jelaskan mengenai kapabilitas militer Turki yang mana menjadi perhatian Saudi dalam ultimatumnya yang ditunjukkan kepada Qatar. Turki juga merupakan salah satu kekuatan dan memiliki pengaruh yang besar di Timur Tengah. Total populasi Turki menembus angka 85.423.034 jiwa pada 2022 (World Population Review, 2022). Data tersebut menempatkan Turki diurutan kedua sebagai negara dengan populasi terbesar setelah Iran. Berdasarkan luas teritorial, luas teritorial Turki mencakup 783,562 km². Mengenai produksi minyak dan gas alam, awalnya Turki adalah negara pengimpor minyak dan gas yang mana Turki mengalokasikan biaya sebesar 40 milyar dollar setiap tahunnya dari Rusia. Hal ini dikarenakan produksi minyak dan gas lokal Turki hanya memenuhi 7% dari kebutuhan sehingga Turki harus melakukan impor sebanyak 260 juta barrel untuk memenuhi operasional negaranya (Trade.gov, 2021). Namun, penemuan cadangan minyak dan gas yang diumumkan oleh presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pada 21 Agustus 2020 di perairan Black Sea memunculkan harapan baru bagi kebutuhan energi dan ekonomi Turki yang mana direncanakan akan diproduksi pada 2023 (Ocoy, 2022).

Penemuan cadangan minyak dan gas di perairan Black Sea tentu menambah *power* yang menguntungkan ekonomi Turki dalam 6-7 tahun kedepan (Aydintasbas, 2017). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelusuran itu sungguh memukau dengan ditemukannya cadangan gas energi dan *hydrocarbon* yang besar. Bahkan area

Mediterania Timur juga menjadi salah satu cadangan energi yang besar dan terpenting di abad ini. Diperkirakan jumlah cadangan minyak itu mencapai 122 triliun kubik/kaki yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan energi di kawasan dan bahkan mencakup Eropa. Namun, dibalik penemuan yang besar justru meningkatkan tensi konflik di kawasan Mediterania untuk memperebutkan cadangan energi tersebut (Stocker, 2019). Penemuan ini tentu memiliki pengaruh pada militer Turki. Dari aspek militer, jika dilihat dari jumlah personil militer, jumlah dan kecanggihan alutsista, dan industri pertahanan lokal, dilansir dari Global Fire Power termasuk dalam urutan 13 dari 142 negara di seluruh dunia. Berbeda satu poin dari Iran yang berada pada urutan 14. Alokasi dana yang dikeluarkan Turki pada aspek militer sebesar 9.690.000.000 USD pada 2022. Dari segi angkatan udara, total pesawat tempur yang dimiliki Turki adalah 1.057 unit. Dari segi angkatan darat, total tank yang dimiliki Turki mencapai 3.022, artileri berjumlah 956, dan rocket berjumlah 407. Sedangkan dari aspek angkatan laut, Turki memiliki aset yang berjumlah 156 unit (Globalfirepower, 2022).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Kenneth Waltz bahwa *power* yang diperoleh suatu negara merupakan kerugian bagi negara lainnya. Melihat kekuatan Iran dan Turki yang relatif besar, tentu kehadirannya di kawasan membuat kekhawatiran bagi Arab Saudi dan anggota GCC lainnya. Sekarang kami bandingkan dengan *power* yang dimiliki oleh Arab Saudi. Saudi memiliki luas teritorial sebesar 2,15 juta km² dengan populasi yang tercatat sebanyak 350.740.791 jiwa pada 2022 (World Population Review, 2022). Saudi merupakan salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia dengan cadangan 266.578 juta barel pda 2016. Berdasarkan wilayah yang strategis di kawasan Teluk dan memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah, membentuk kepentingan dan kebijakan luar negeri Saudi untuk menyeimbangkan produksi dan harga minyak di seluruh dunia.

Mengenai kapabilitas militer Saudi, menurut global fire power Saudi tercatat berada dalam urutan 20 dari 142 negara yang terdaftar pada 2022 (Globalfirepower, 2022). Dalam hal ini, Saudi berada 6-7 poin dari Iran dan Turki. Saudi memiliki personil militer aktif berjumlah 34.783.757 jiwa. Dana yang dialokasikan untuk keperluan pertahanan berjumlah 46 milyar USD. Dalam angkatan udara, total pesawat tempur yang dimiliki berjumlah 897 unit. Sedangkan pada aspek angkatan darat, Saudi memiliki 1.062 tank, 705 artileri, dan 275 roket. Dan pada segi angkatan laut Saudi memiliki total 57 aset. Kekuatan militer Saudi juga diperkuat oleh militer AS yang berpangkal di Saudi dan semakin bertambah pada era Donald Trump. Namun, presiden AS yang baru, Joe Biden berencana menarik pasukannya di Saudi yang

dipicu oleh kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Gamal Kashogi (Grambell, 2022). Berikut di bawah ini perbandingan kekuatan militer yang dimiliki oleh Arab Saudi, Iran, dan Turki.

pemberontak Houthi dan pemerintahan Presiden Hadi yang mendapat dukungan dari Arab Saudi.

Pemberontak Houthi adalah kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Tepatnya,

Tabel Perbandingan kekuatan militer Arab Saudi, Iran, dan Turki

No.	Negara	Rank	Personil aktif	Pesawat Jet	Tank	Nuklir	Kapal Selam	Budget (USD)
1	Turki	13	775.000	1.057	3.022	-	156	9.690.000.000
2	Iran	14	1.015.000	543	1.030	Tidak diketahui	142	5.000.000.000
3	Saudi	20	350.000	897	1.062	-	57	46.000.000.000

Dalam menentukan ranking, Global Fire Power memformulasikan berdasarkan *nation power index* yang dihitung dari kekuatan militer, finansial, logistik, dan geografi.

Semenjak revolusi Islam Iran 1979 terjadi, hubungan antara Iran dan Saudi memanas. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini membawa perubahan besar bagi domestik Iran dengan tumbangannya rezim Reza Shah Pahlevi itu sendiri dan bagi kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Tujuan dari revolusi Iran sendiri adalah untuk menggulingkan rezim otoriter pro Amerika serta mengubahnya menjadi negara teologi berbasis Islam Syiah. Tentunya peristiwa revolusi Iran 1979 menjadi ancaman bagi Saudi yang mana merupakan salah satu aliansi AS di Timur Tengah. Setahun setelah terjadinya revolusi, Iran membuat propaganda terhadap Saudi dengan menyebutnya sebagai "*American version of Islam*". Iran yang memiliki senjata nuklir juga menjadi perhatian Saudi yang mana sempat ada wacana Saudi untuk memulai membangun program nuklir untuk menandingi Iran. Dalam menyebarkan pengaruhnya, kedua negara terlibat pada proxy war yang saling bertentangan di Yaman, Suriah, dan Iraq (Mohamed, 2016).

Krisis Yaman merupakan salah satu aksi Iran dalam menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Krisis Yaman dimulai pada revolusi terhadap Ali Abdullah Saleh pada periode 2011-2012. Beliau memimpin Yaman selama 33 tahun dan harus menyerahkan tahtanya setelah Saudi menarik bantuannya. Peristiwa *Arab Spring* memperparah kondisi ini yang mana telah memicu lengsernya pemimpin-pemimpin otoriter di Timur Tengah seperti Mesir, Libya, dan Tunisia. Hingga tahun 2019, konflik Yaman telah menjatuhkan korban jiwa sebanyak lebih dari 70.000 jiwa dan dengan situasi perang yang melibatkan serangan udara serta blokade-blokase, lebih dari 3 juta penduduk Yaman pun harus menjadi pengungsi. Serangan udara yang dilancarkan oleh Arab Saudi dan koalisinya pun berdampak pada besarnya persentase dari keseluruhan korban konflik Yaman. Beberapa aktor penting dalam konflik ini adalah kelompok

kelompok ini berasal dari provinsi Sa'ada. Sebuah wilayah yang miskin dan begitu berbeda dengan Yaman Selatan. Penamaan Al-Houthi ini juga didasarkan dari nama pendirinya, yakni Husein Badaruddin Houthi. Ia merupakan anak dari tokoh Syiah Zaidiyah di Yaman. Di awal karir politiknya, Husein Al-Houthi adalah salah satu pendiri Partai Al-Haq, sebuah partai yang berideologikan Islam. ketika partai sosialis berkuasa pada tahun 1991 di Yaman, partai Al-Haq ini dibentuk guna mencegah meluasnya pemikiran ekstrim tersebut. Di tahun 1996, ketika banyak warga Yaman yang memiliki aliran wahabi dari Afghanistan kembali ke Yaman, terjadilah pertentangan dan perpecahan di pemerintah Yaman, agar pemikiran ekstrim tersebut tidak meluas, pemerintah Yaman pun meminta bantuan kepada Husein Al-Houthi (Sharp, 2020).

Arab Saudi mulai membentuk koalisi untuk melawan pemberontak Houthi di bulan maret 2015. Sejumlah negara lainnya, seperti AS pun turut mendukung koalisi Arab Saudi lewat dukungan senjata. Pada tahun 2015, koalisi dibawah pimpinan Arab Saudi ini mulai melakukan pengeboman terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Serangan udara tersebut pada mulanya ditujukan untuk menargetkan pangkalan udara, situs rudal, serta kamp houthi lainnya, namun akhirnya menyebabkan korban massal dari warga sipil. Serangan-serangan udara telah menghancurkan banyak fasilitas umum dan vital di Yaman, seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit. Berdasarkan data dari Komisaris Tinggi OHCHR di tahun 2018, jumlah korban dari serangan udara ini diperkirakan mencapai sekitar 17.062 korban, dengan 6.592 meninggal dunia dan 10.470 luka-luka (Bhasuki, 2019).

Arab Saudi melakukan serangan militer besar-besaran ke negara Yaman. 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara dikerahkan oleh Arab Saudi dalam operasi militer tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga melakukan penargetan terhadap pusat-pusat bantuan kemanusiaan bagi penduduk Yaman, seperti bombardir yang dilakukan terhadap pelabuhan Hodaideh yang berada di bagian Barat Yaman. Pelabuhan ini adalah wilayah penting bagi penyaluran bantuan internasional kepada warga Yaman. Arab

Saudi dan sekutunya juga menempatkan pasukan angkatan laut di daerah perairan Yaman sejak 2015, hal ini dilakukan agar dapat menghentikan penyelundupan senjata kepada pemberontak Houthi. Bukan hanya menghentikan penyelundupan senjata, Arab Saudi juga melakukan pencegahan terhadap masuknya pasokan obat-obatan, makanan, dan bahan bakar. Serangan militer dan blokade darat, laut, serta udara yang dilakukan oleh Arab Saudi telah menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh dan adanya krisis kemanusiaan di Yaman. Selain itu, dari pihak Arab Saudi, diperkirakan telah kehilangan 133 tentara dalam perangnya melawan pemberontak Houthi (Sharp, 2020).

Dalam krisis Yaman, Iran memiliki peranan penting didalamnya. Tidak seperti Saudi yang membangun aliansi dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya GCC, Iran cenderung untuk beraliansi dengan *non-state actor*, dalam kasus ini Houthi. Sudah menjadi kecenderungan Iran dalam mendukung *non-state actor* dalam memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah, seperti Hamas di Palestina, Hezbollah di Lebanon, Asa'ib Ahl al-Haq di Iraq, dan Houthi di Yaman. Dalam memilih Houthi sebagai aliansi, menurut Thomas Juneau, Iran tidak memilih Houthi berlandaskan pada persamaan ideologi melainkan pihak yang bertentangan dengan status quo yang didominasi oleh AS beserta aliansinya, dalam hal ini Arab Saudi dan Israel (Ramadhan, 2020). Jika ditelaah kembali, di Palestina Iran mendukung Hamas yang bertentangan dengan Israel dan di Afghanistan yang mana Iran mendukung Taliban yang anti terhadap AS. Kebijakan ini dilakukan Iran sebagai *balancing* terhadap AS dan aliansinya.

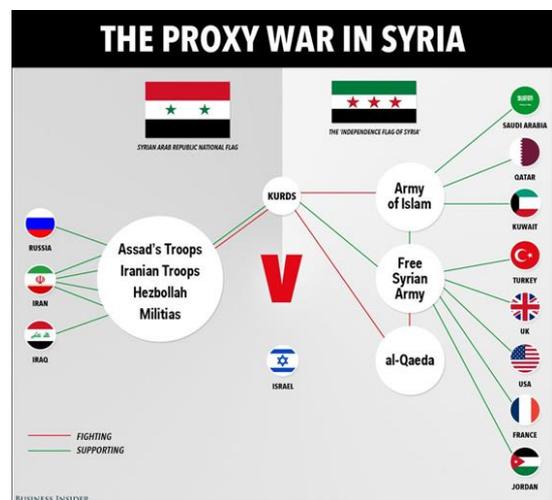
Iran mengalokasikan dana sebesar 100 juta Dollar setiap tahunnya dalam rangka mendukung Houthi (Ramadhan, 2020). Semenjak krisis Yaman berkejadian, Houthi telah menggunakan misil balistik yang beraneka ragam. Diketahui terdapat tiga sumber utama bantuan alutsista yang diperoleh Houthi (Williams, 2020), yaitu persediaan senjata milik pemerintah Yaman yang mana dibeli dari Uni Soviet, peluncuran senjata yang diperoleh dari koalisi Arab, dan bantuan dari Iran melalui rute penyelundupan. Empat tahun lalu, AS dan koalisi Arab menemukan bukti atas penyelundupan senjata oleh Iran untuk Houthi. Bukti tersebut berbentuk serpihan misil dengan manufaktur yang berasal dari Iran dan menemukan misil-misil tersebut di pos area latihan kelompok Houthi. Misil-misil tersebut di antaranya Burkan Series Ballistic missiles, the Qurds-1 cruise missiles, the al mandab-1 antiship missiles, dan the sayyad-2C surface to air missiles.

Pada 2019 Iran kembali menunjukkan hubungannya dengan kelompok Houthi di kala tensi dengan AS sedang meningkat. Kala itu kelompok Houthi meluncurkan 2 the Qurds-1 cruise missiles dan 15 bomb laden UAVs. Pada Mei, kelompok Houthi

mengklaim bahwa mereka telah meluncurkan serangan drone diperbatasan 800 km Yaman dan Saudi dalam penyerangannya terhadap 2 unit penyulingan minyak Saudi yang menyebabkan Saudi untuk menutup jalur pipa minyak pada saat itu. Setelah diselidiki, Intelijen AS menemukan drone yang digunakan kelompok Houthi adalah milik Iran. UN report pada 2019 menyatakan "pada 2015 dan 2016 senjata dan alutsista seperti misil balistik telah disuplai kepada kelompok Houthi dari luar Yaman. Kelompok Houthi dalam hal ini sangat bergantung pada *high-value component* yang kemudian dikombinasikan kembali oleh kelompok Houthi (Williams, 2020). Keikutsertaan Iran dalam konflik Yaman tentunya mengancam eksistensi dari Arab Saudi yang menimbulkan persaingan *balance of power* di antara kedua negara di kawasan Timur Tengah.

Iran juga menyebarkan pengaruh yang bertentangan dengan Saudi di Suriah. Peristiwa Arab Spring juga memiliki pengaruh pada *proxy war* yang berkelanjutan di Suriah pada 2011. Pihak oposisi menuntut untuk mengakhiri rezim Bashar al Assad dan keluarganya yang sudah menguasai Suriah dalam empat dekade. Rezim Assad ini diawali oleh ayah dari Bashar al Assad, yakni Hafez al Assad pada 1970. Melihat Suriah memiliki posisi yang strategis, konflik ini berubah menjadi *proxy war* yang melibatkan banyak pihak, terutama dengan masuknya negara *superpower* seperti AS dan Rusia serta ditambah dengan keterlibatan ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). *Free Syrian Armies* merupakan salah satu pihak oposisi terbesar dengan memiliki 50.000 pejuang. Pihak oposisi ini juga meliputi *Jubhat al Nusra*, *The Syrian Liberation Front*, *the Syrian Islamic Front*, dan *Independent Brigade Alliances*. Sementara itu, organisasi yang membela rezim Assad adalah Hizbollah yang turut ikut berpartisipasi.

Gambaran komplikasi keterlibatan aktor dalam *proxy war* Suriah



Gambar di atas memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam *proxy war* di Suriah. Dapat dilihat

posisi Iran dan Saudi yang bertentangan satu sama lain. Dalam konflik Suriah, Iran berpihak kepada rezim Bashar al Assad. Sedangkan, Arab Saudi memihak pada oposisi. Iran memiliki kontribusi yang signifikan yaitu dalam bekerjasama dengan tentara asing dan melakukan perekrutan tentara bayaran guna membantu rezim Assad. Dalam hal ini, Iran mengeluarkan budget sebesar 7,6 miliar Dollar untuk menggaji tentara bayaran yang direkrut dari Iraq, Afghanistan, Pakistan, dan juga Lebanon (Saban, 2022). Tujuan ini juga dilakukan untuk menyebarkan pengaruh dan membatasi pergerakan oposisi, terutama AS dan Arab Saudi di Suriah. Begitu juga sebaliknya dengan aktivitas Saudi yang bertujuan untuk memperluas hegemoninya dan membatasi pengaruh Iran di Suriah.

Persaingan antara Iran dan Saudi juga berlanjut di Iraq. Setelah mantan presiden AS, George W Bush, melakukan propaganda terhadap Saddam Hussein untuk menggulingkan kekuasaannya dengan mengatakan bahwa Iraq memiliki WMD (*Weapon of Mass Destruction*) yang nyatanya tidak terbukti. Berakhirnya rezim Saddam Hussein membawa ketidakpastian pada kondisi ekonomi, politik, dan budaya di Iraq yang membawanya pada krisis berkelanjutan (Pollack, 2004). Pascarezim Saddam Hussein, kebijakan AS adalah untuk membangun kembali pemerintahan Iraq yang baru. Namun, nyatanya AS tidak mampu untuk membawa perbaikan bagi Iraq menurut laporan dari *World Bank* (Cordesman, 2003). Pada 2007 AS mulai menarik pasukannya dan pada 2011 seluruh pasukan AS sudah meninggalkan Iraq.

Iraq merupakan bagian dari strategi regional Iran dan Saudi dalam menyebarkan hegemoninya di Timur Tengah. Bukan tanpa alasan, Iraq merupakan wilayah yang penting dan strategis bagi Iran. Salah satu tujuan adalah untuk melindungi mayoritas warga Syiah yang mengalami telah diskriminasi oleh rezim otoriter Sunni di Iraq. Selain itu, terdapat beberapa 4 kota suci bagi Syiah, yaitu Najaf, Karbala, Kazimain, dan Samarra. Iran berbatasan langsung dengan Iraq (1.450 km) yang tentunya apa yang terjadi di Iraq dapat memiliki dampak langsung terhadap Iran. Oleh karena itu, penting bagi Iran untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Iraq. Setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein dan AS mengambil alih Iraq, kekhawatiran Iran adalah kepada transformasi Iraq yang berubah menjadi antek AS (Litvak, 2018).

Setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein pada 2003, Iran telah melakukan langkah konkret dalam memperluas pengaruhnya di Iraq. Langkah konkret Iran dipecah menjadi 3 bagian, yaitu *inter-state level*, *party-movement level*, dan *military-strategic level* (Litvak, 2018). Pada *inter-state level*, Iran melakukan persuasi kepada pemimpin atau orang yang memiliki pengaruh untuk melakukan kerjasama pada bidang

keamanan dan ekonomi. Pemerintah Iran berinisiasi untuk melakukan *funding* terhadap rekonstruksi pembangunan kota di Iraq. Sebagai imbalan, Iraq harus mendukung kebijakan Iran di Lebanon dan Suriah. MoU terakhir kali ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 23 Juli 2017. Pada *party-movement level*, pada saat Saddam Hussein masih berkuasa, pemerintah Iran memberikan suaka perlindungan dan bantuan kepada partai dan organisasi oposisi di Iraq. Setelah 2003, Iran juga mempersenjatai dan melakukan pelatihan pada milisi Syiah yang memiliki hubungan dengan beberapa partai oposisi di Iraq. Iran juga memiliki pengaruh dalam berbabagi kebijakan yang dilancarkan oleh partai Syiah di Iraq. Terakhir, pada *military-strategic level* merupakan manifestasi dari Iran. Seperti contoh Brigadir Iraj Masjadi yang berkantor di pertahanan Iraq pada 2017 sebelumnya merupakan *Revolutionary Guards Corp*.

Kebijakan yang dilakukan Iran merupakan dampak dari kebijakan AS dalam menguasai Iraq. Saudi yang merupakan antek dari AS juga melakukan hal yang sama terhadap Iraq, yaitu mengembalikan kedamaian dan ketertiban serta mengantisipasi munculnya terorisme. Padahal, sebelumnya hubungan antara Saudi dan Iraq dipenuhi dengan konfrontasi dan isolasi melihat Iraq pada era Saddam Hussein yang merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kala itu. Setelah runtuhnya rezim Saddam, fokus Saudi terhadap Iraq seharusnya adalah pada kestabilan domestik, campur tangan asing, kebijakan produksi minyak, dan evolusi politik atas berkembangnya Syiah (McMillan, 2006). Namun, pada 2006 Saudi kehilangan momentum dalam menyebarkan pengaruhnya di mana pada saat itu perdana menteri Iraq, Nuri al Maliki, berkunjung ke Saudi untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Akan tetapi, ditolak oleh raja Abdullah yang menganggap Iraq sebagai tangan kanan Iran. Baru pada 2015 normalisasi hubungan antara Saudi dan Iraq terwujud dengan Saudi perwakilannya ke Baghdad dan membuka konsulat jendral di Basra 2019 (Riedel, 2020). Pada 30 Juli 2017, ulama Syiah Iraq Muqtada al Sadr mengunjungi Saudi yang disambut oleh Muhammad bin Salam. Dalam pertemuan tersebut, muncul kesepakatan bahwa Saudi setuju untuk memberikan dana sebesar 100 milyar Dollar untuk merekonstruksi kota Sunni yang telah hancur oleh perang, yakni Mosul, Tikrit, Ramadi, dan Fallujah (Srouf, 2022). Langkah ini merupakan salah satu langkah untuk menyeimbangkan hegemoni Iran di Iraq.

Selain tensi antara pemimpin Sunni dan Syiah. Persaingan dan *balance of power* juga terjadi antara dalam dunia Sunni, yaitu Arab Saudi dengan Turki. Sebelum peristiwa arab spring, Turki dan Saudi memiliki hubungan kerjasama yang erat. Tercatat, ekspor Turki meningkat dari 554 juta Dollar menjadi 2,2 juta Dollar pada periode 2002-2010. Dari segi

impor juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 120 juta Dollar pada 2002 menuju 1,3 milyar Dollar pada 2010 (Baskan, 2019). Setelah peristiwa Arab Spring meletus, serta terseratnya Ikhwanul Muslimin sebagai *game changer* di beberapa wilayah Timur Tengah, muncul kontroversi antara Saudi dan Turki. Kedua negara memiliki preferensi yang berbeda dalam menanggapi fenomena tersebut. Turki lebih memilih untuk mendukung segala bentuk pergerakan IM, termasuk di Mesir, Libya, dan Qatar. Berbeda dengan Saudi yang melihat IM sebagai ancaman. Hal ini membuat hubungan antara Turki dan Qatar menjadi lebih hangat.

2011 merupakan titik balik bagi kebijakan luar negeri Turki terhadap kawasan Timur Tengah. Ditengah bergejolaknya dampak *Arab Spring* di Mesir, Turki merupakan salah satu pihak yang mendukung kudeta terhadap rezim Hosni Mubarak. Dalam hal ini, Turki mendukung Muhammad Morsi yang dilatarbelakangi oleh IM. Namun, hubungan Turki dan Mesir memburuk setelah runtuhnya era Morsi yang digantikan oleh Abdel Fattah el Sisi. El Sisi mengambil langkah dengan menarik duta besarnya dari Turki serta mengusir perwakilan Turki di Mesir. Sementara itu, jatuhnya Hosni Mubarak juga membawa perubahan pada hubungan Mesir dan Arab Saudi. Hubungan Mesir dan Saudi juga mengalami pasang surut. Berbeda dengan Turki, Saudi mendukung penuh rezim militer El Sisi setelah Muhammad Morsi lengser dari kursi kepresidenan (Piazza, 2018). Perbedaan politik dan preferensi kebijakan luar negeri antara Saudi dan Turki juga terjadi dalam *proxy war* di Libya. *Proxy war* ini diawali dengan runtuhnya Gaddafi yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Libya. Kini Libya terbagi menjadi dua belah pihak yang mengakui dirinya sebagai pihak pemerintahan yang sah, yaitu GNA (*General National Accord*) dan LNA (*Libya National Army*). GNA dipimpin oleh Fayez al Seraj dan merupakan pihak pemerintah Libya yang diakui oleh PBB (Virk & Salyk, 2020). Sementara itu, LNA didirikan oleh Khalifa Haftar pada 2014 yang tidak setuju dan sebagai tandingan dari berdirinya GNC (*General National Council*) yang merupakan cikal bakal GNA. Turki merupakan salah satu pihak yang aktif mendukung GNA sebagai pemerintahan yang sah di Libya karena GNA dipengaruhi oleh IM. Sementara itu, Saudi dan UEA merupakan pihak yang mendukung LNA.

Pernyataan di atas merupakan penjabaran dari persaingan hegemoni dan *balance of power* negara yang memiliki kapabilitas *power* yang besar di timur Tengah. Konflik Qatar dan GCC merupakan babak kelanjutan dari strategik dan ajang menyebarkan pengaruh di kawasan. Pemicu utama dari alasan Saudi merubah arah kebijakan dengan melakukan normalisasi dengan Qatar adalah dampak yang dihasilkan oleh kebijakan Saudi sebelumnya dalam memelopori blokade terhadap Qatar. Alasan terbesar

Saudi melakukan normalisasi ialah membalance dan mengurangi hegemoni Iran dan Turki di kawasan. Dalam hal ini, pihak Saudi lah yang tertekan dengan kehadiran Iran dan Qatar yang berhasil memanfaatkan situasi yang terjadi. Ditambah dengan sikap AS era Biden yang lebih condong dalam mendukung Qatar. Hubungan AS dan Qatar semakin erat dengan menjadikan Qatar sebagai MNNA (*Major Non-NATO Ally*) (Cooper, 2022).

Iran merupakan salah satu kunci dari permasalahan krisis yang terjadi antara Qatar dan GCC. Salah satu alasan krisis ini terjadi adalah kedekatan Qatar dengan Iran yang mengancam eksistensi Arab Saudi dan anggota GCC lainnya. Pada saat blokade terjadi, Iran merupakan salah satu pihak selain Turki yang memberi bantuan terhadap Qatar. Kedekatan antara Qatar dan Iran dapat dilihat website resmi Qatar yang pernah mengatakan Iran sebagai "*a big power in the stabilisation of region*". Akibat bantuan Iran, hubungan bilateral kedua negara semakin erat. Hal ini ditandai dengan Qatar mengumumkan untuk mengirim kembali perwakilannya ke Tehran dengan aspirasi penguatan hubungan bilateral dengan Republik Islam Iran dalam segala bidang. Presiden Iran, Hassan Rouhani menyatakan dukungan kepada Qatar bahwa akan memperkuat hubungan bilateral dengan Qatar serta menyatakan bahwa blokade yang terjadi kepada Qatar merupakan sesuatu yang tidak adil (Zaccara, 2019).

Selain dukungan melalui pernyataan politik, Iran juga membuat dukungan aksi nyata terhadap Qatar. Salah satunya adalah mengatur ulang dan memberikan slot penerbangan Iranian Airspace kepada Qatar Airways yang memiliki kendala penerbangan akibat blokade dari GCC. Selain itu, Iran juga memberikan bantuan berupa suplai makanan kepada Qatar guna mengurangi ketergantungan impor kepada negara-negara Teluk. Iran juga bersedia menjadi partner dagang dan menjalankan roda bisnis di Qatar untuk menutupi hubungan perdagangan yang hilang yang sebelumnya diisi oleh Saudi. Pada November 2017, menteri perekonomian, industri, tambang dan perdagangan, dan luar negeri Qatar mengunjungi Tehran untuk memperkuat hubungan bisnis kedua negara. Akibat dukungan Iran, tercatat ekspor Iran ke Qatar mencapai 139 juta Dollar yang menunjukkan peningkatan sebesar 117,5 persen (Zaccara, 2019). Fenomena ini membuat dampak sanksi blokade tidak begitu berpengaruh terhadap Qatar.

Selain Iran, Turki juga menunjukkan dukungannya terhadap Qatar. Terdapat spekulasi pada *decision' makers* Turki bahwa mereka akan menjadi target berikutnya jika krisis Qatar tidak terselesaikan. Bahkan terdapat pihak yang mengatakan Turki sebagai target utama yang sebenarnya. Terdapat alasan utama mengapa Turki

membantu Qatar dari serangan Saudi dan aliansinya, yaitu pengaruh Turki di Timur Tengah. Secara Turki dan Qatar memiliki kepentingan yang sama, yaitu organisasi IM di mana kedua negara sejalan dengan kondisi yang terjadi mengenai IM di Libya dan Mesir. Oleh karena itu, Turki dengan cepat membangun pangkalan militer di Qatar. Tercatat, terdapat 100 pasukan Turki dan akan berkembang menjadi 3000 pasukan di Qatar. Kedua negara juga melakukan kerjasama militer pada 1 Agustus 2017 dengan tercatat sebanyak 250 tentara Turki ikut berpartisipasi dengan membawa kendaraan militer (Aras, 2017).

Blokade yang dilakukan Saudi dan GCC mengundang dua kekuatan besar di kawasan Teluk yang dapat membahayakan bagi Saudi dan aliansinya. Selain itu, terdapat faktor yang melemahkan Saudi, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara Donald Trump dan Joe Biden dalam menanggapi krisis Qatar. Dalam hal ini, Trump mendukung tindakan Saudi dan GCC dalam melakukan blokade terhadap Qatar. Hal ini dinyatakan secara tersirat oleh Trump dalam Riyadh Summit dengan mengatakan bahwa beliau menyetujui blokade Qatar sebagai bentuk dari memerangi tindakan terorisme (Kabalan, 2018). Pernyataan tersebut membuat Saudi dan aliansinya semakin percaya diri dalam memblokir Qatar karena mendapat dukungan dari AS. Berbanding terbalik dengan era Biden, pada saat kampanye pemilihan presiden, Biden mengutuk Arab Saudi, khususnya Mohammed bin Salman atas pembunuhan terhadap Jamal Kashogi. Selain itu, Biden juga mengatakan tidak akan menjual alutsista kepada Saudi jika ia terpilih sebagai presiden (Wright, 2022).

Kebijakan yang dilontarkan Biden dalam kancah Timur Tengah melemahkan Saudi. Selain pernyataan kontroversial terhadap Saudi, Biden juga membuat langkah yang merugikan Saudi dengan wacana untuk menghidupkan kembali JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) yang pernah dibuat pada era Presiden Barack Obama pada 2015 dan ditinggalkan pada era Donald Trump. JCPOA bertujuan untuk menghentikan kelanjutan program nuklir Iran dan sebagai gantinya, sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut. Saudi merupakan salah satu pihak yang menolak JCPOA. Saudi menganggap pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran dapat berdampak pada kawasan Teluk. Menurutnya, JCPOA akan membawa Iran pada kejayaan kembali dengan kembali melakukan ekspor minyak. Jika dibiarkan maka dunia akan dibanjiri dengan minyak mentah Iran yang murah dan akan menghancurkan harga minyak dunia yang tentunya sangat merugikan Saudi dan GCC. Usaha Biden untuk menghidupkan kembali JCPOA tentu melemahkan kondisi Saudi (Al Jaeera, 2015).

Kondisi ini diperparah dengan merebaknya pandemi Covid 19 yang menyebabkan dampak ekonomi, khususnya pada sektor minyak,

pariwisata, impor makanan, dan finansial. Perlu ditekankan kembali bahwa sektor minyak merupakan sumber pendapatan terbesar Arab Saudi. Kebijakan luar negeri Saudi yang terpenting adalah menyeimbangkan supply-demand minyak dunia agar harga minyak tidak terlalu murah dan sebaliknya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari ekspor minyak (Pierce, 2012). Maka dari itu, Saudi merupakan negara yang paling berpengaruh di OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*). Namun, harga minyak dunia sempat turun di bawah rata-rata bahkan sebelum merebaknya Covid 19 dan diperparah dengan kehadirannya karena segala bentuk perdagangan banyak yang tertunda (Woert, 2020). Oleh karena itu, Saudi memutuskan langkah terbaik dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar.

Normalisasi Arab Saudi dan aliansinya terhadap Qatar merupakan babak lanjutan dari persaingan hegemoni kekuatan besar di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Iran, dan Turki. Kebijakan Saudi melakukan normalisasi dengan Qatar adalah dampak dari respon dari kebijakan Saudi dalam memblokir Qatar yang mengundang kehadiran Iran dan Qatar di kawasan Teluk. Ditambah dengan situasi yang tidak menguntungkan dengan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS yang memiliki kebijakan berbeda dengan presiden sebelumnya, Donald Trump. Menurut Waltz, satu kekuatan besar akan melakukan *balancing* terhadap kekuatan besar lainnya. Kebijakan Saudi melakukan normalisasi dengan Qatar merupakan keputusan yang tepat saat ini agar Qatar tidak jatuh terhadap pengaruh Iran dan Turki yang dapat mengancam eksistensi Saudi dan aliansinya. Normalisasi ini merupakan bentuk dari *prisoner's dilemma* yang diputuskan oleh Saudi untuk menghindari kerugian dan ancaman yang lebih besar jika tetap berseteru dengan Qatar. Selain itu, *relative gain* dalam hal ini dapat dilihat dari kerjasama kedua belah pihak yang mana posisi Qatar lebih diuntungkan.

KESIMPULAN

Dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar, jika dilihat dari sudut pandang neorealisme terdapat beberapa pertimbangan. Krisis Qatar membawa kepada ancaman yang lebih besar terhadap eksistensi Saudi beserta aliansinya, yaitu kehadiran Iran dan Turki di kawasan Teluk. Krisis Qatar dapat dikatakan sebagai lanjutan dari perebutan hegemoni antara Arab Saudi dan Iran serta begitu juga dengan Turki yang tumbuh dan diperhitungkan kekuatannya di Timur Tengah. Normalisasi hubungan merupakan jawaban dari aksi Qatar dalam menyeimbangkan kekuatan Saudi yang dimanfaatkan oleh Iran dan Turki.

Selain itu, krisis Qatar merupakan pendeskripsian dari strategi prisoner's dilemma yang diterapkan Saudi karena merupakan pilihan yang rasional atas struktur internasional yang tidak menguntungkannya. Pada saat itu, terpilihnya Joe Biden merupakan langkah mundur bagi Saudi dengan wacana dihidupkan kembali JCPOA yang diperkirakan dapat mengembalikan kejayaan Iran di Timur Tengah. Kondisi buruk ini ditambah dengan merebaknya Covid 19 yang berdampak pada perekonomian dan turunnya harga minyak dunia yang tentu melemahkan Saudi. Sehingga, jalan terbaik adalah melakukan normalisasi hubungan dengan Qatar untuk mengurangi resiko dan berkembangnya hegemoni Iran dan Turki di kawasan Teluk. Gambaran dari kerjasama antara Saudi dan Qatar juga dapat dilihat pada kaca mata relative gain yang mana lebih menguntungkan Qatar.

Saran untuk penelitian selanjutnya, hubungan antara Arab Saudi dan Qatar akan terus berkembang dan mengalami perubahan naik-turun. Hal ini didasari dengan faktor latarbelakang historis kedua belah pihak yang saling bersaing antara satu dengan yang lain. Persaingan ini dapat dilihat dari persaingan ideologi antara Wahhabi dengan Ikhwanul Muslimin yang lebih moderat. Faktor kedua adalah mengenai rumitnya kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada arah kebijakan luar negeri yang sulit diprediksi oleh setiap negara. Seperti contoh kerjasama Arab Saudi dan Qatar dalam *proxy war* di Suriah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya harus jeli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di Timur Tengah dalam memahami perubahan kondisi politik antara Arab Saudi dengan Qatar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzawahreh, Abdallah. (2021). Prisoner's Dilema Theory in International Relations: A Theoretical and Practical Study on Saudi-Iranian Relations. *Canadian Social Science*, 17(5), pp 30-34
- Aras & Akpinar, 2017, Turkish Foreign Policy and Qatar Crisis. *Istanbul Policy Center*, pp.3-7
- Aydintasbas, Asli. (2017) "Under the Waves: Turkey's Black Sea Gas Discovery and Relations with Europe". <https://ecfr.eu/article/commentary-under-the-waves-turkeys-black-sea-gas-discovery-and-relations-wi/>.
- Baskan, Birol. (2019). Turkey between Qatar and Saudi Arabia: Changing Regional and Bilateral Relations. *Uluslararası İlişkiler*, 16(62), pp.85-95
- Bhasuki, A. R., Siahaan, J. D., Dermawan, W., & Akim. (2019). Perang Saudara di Yaman: Analisis Kepentingan Negara Interventif dan Prospek Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Unikom*, 9(1). pp.8-24
- Burchill, Scott. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan
- Cooper, Clarke. (2022) "As Qatar Becomes a non-NATO Ally, Greater Responsibility Conveys with the Status", <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/as-qatar-becomes-a-non-nato-ally-greater-responsibility-conveys-with-the-status/>.
- Cordesman, Anthony. (2018). The Challenge of Past Divisions and Conflicts. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*.
- Grambell, (2022) Jon. "US Exploring Bases in Saudi Arabia amid Iran Tensions". <https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/01/26/us-exploring-new-bases-in-saudi-arabia-amid-iran-tensions/>.
- Gordon, yadlin, & Heistein. (2017). The Qatar Crisis: Causes, Implications, Risks, and the Need for Compromise. *The Institute for National Security Studies*.
- Iran Population Review (2022), diakses dari <https://worldpopulationreview.com/countries/iran-population>
- Iran Nuclear Program: UN Watchdog Unable to Access Data Since February, (2022) <https://www.theguardian.com/world/2021/jun/01/iran-nuclear-program-un-watchdog-unable-to-access-data-since-february>,
- Kabalan, Marwan. (2018). The Gulf Crisis: The U.S. Factor. *The Gulf on Verge Global Challenges and Regional Dynamics*, 20(2), pp.35-50
- Litvak, Meir. (2018). Iran in Iraq: An Area of Strategic Influence. *Institute for National Security Studies*. Pp.41-49
- Maclean, Gamal, & Finn. (2022) "Arab States Issue Ultimatum to Qatar: Close Jazeera, Curb Ties with Iran". <https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-demands-idUSKBN19E0BB>.
- Mcmillan, Joseph. (2006). Saudi Arabia and Iraq: Oil, Religion, and Enduring Rivalry. *US Institute of Peace*. Pp.1-14
- Mohamed, Ahmad & Moorthy, Raichandran. (2016) Saudi-Iran Rivalry in the Middle East: Implication to National Security. *Journal of Sciences and Humanities*, 16(1), pp.1-11
- Ozcoy, Tugce. (2022) "Turkey has Discovered More Natural Gas in Black Sea, Erdogan Says". <https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/4/turkey-has-discovered-more-natural-gas-in-black-sea-erdogan-says>.
- Piazza, Barbara. (2018). The Foreign Policy of Post-Mubarak Egypt and the Strengthening Relations with Saudi Arabia: Balancing between Economic Vulnerability and Regional Regime Security. *The Journal of North African Studies*, 24(3), pp.1-25

- Pollack, Kenneth (2004), *The Persian Puzzle: The Conflict between Iran and America*, New York: Random House.
- Ramadhan, Riskiansyah. (2020). *The Role of Iran in Yemen Conflict 2014-2018 (An Analysis of Constructivism)*. *School of Strategic and Global Studies*, pp.457-466.
- Riedel, Bruce & Harvey, Katherine. (2020) "Why is Saudi Arabia Finally Engaging with Iraq". <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/04/why-is-saudi-arabia-finally-engaging-with-iraq/>.
- Saban, Navvar. (2022) "Factbox: Iranian Influence and Presence in Syria". <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-and-presence-in-syria/>.
- Saudi Arabia Population 2022 (2022), diakses dari <https://worldpopulationreview.com/countries/saudi-arabia-population>
- Schweller, R. L. (2004). Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing. *International Security*, 29(2), 159-201.
- Snidal, Duncan. (1991). Relative Gain and the Pattern of International Cooperation. *The American Political Sciences review*, 85(3). Pp.701-726
- Sharp, J. M. (2020). Yemen: Civil War and Regional Intervention. *Congressional Research Service*.
- Sonnefeld, Daniel. (2022) "Turkish Army Places 1st in New Ranking in MidEast Military Strength". <https://themedialine.org/top-stories/turkish-army-places-1st-in-new-ranking-of-mideast-military-strength/>.
- Srouf, Maged. (2022) "How did Saudi Arabia's policy towards Iraq Change in the Past Few Months?". <https://www.egic.info/saudi-arabia-policy-change-iran>.
- Stocker, James. (2012). No. EEZ Solution: The Politics of Oil and Gas in the Eastern Mediterranean. *The Middle East Journal*, 66(4), pp.579-597
- Taneja, Kabir. (2022) "Behind Saudi Arabia Normalising Ties with Qatar". <https://www.orfonline.org/expert-speak/behind-saudi-arabia-normalising-ties-qatar/>.
- Turkey Population 2022 (2022), diakses dari <https://worldpopulationreview.com/countries/turkey-population>
- Turkey-Oil and Gas (2021), diakses dari <https://www.trade.gov/energy-resource-guide-turkey-oil-and-gas>
- International Trade Administration, <https://www.trade.gov/energy-resource-guide-turkey-oil-and-gas#:~:text=Turkey%20spends%20over%20%2440%20billion,has%20not%20been%20widely%20explored>. Diakses pada 2022.
- Qatar Crisis: Saudi Arabia and Allies Restore Diplomatic Ties with Emirates, (2022), <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55538792>
- Virk & Salyk, Melissa. (2020). Airstrikes, Proxy War, and Civilian Casualties in Libya. *New America*
- Waltz, Kenneth. (1979). *Theory of International Politics*. Mass: Addison-Wesley Pub.Co,
- Wahyuni, Sri & Baharuddin, Shireen. (2017) *The Impact of the GCC Boycott on Qatar Foreign Policy*. *Jurnal Transformasi Global*: 4(4).
- Why Saudi Arabia and Israel Oppose Iran Nuclear Deal (14 April 2015), <https://www.aljazeera.com/news/2015/4/14/why-saudi-arabia-and-israel-oppose-iran-nuclear-deal>.
- Williams, Ian & Shaikh, Shaan. (2020). The Missile War in Yemen. *Center for Strategic and International Studies*, pp.15-19.
- Wintour, Patrick (2022). "Qatar Given ten days to meet 13 sweeping demand from Saudi Arabia". <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade>.
- Wright, Robin. (2022) "The Sweeping Impact of a Broken Biden Campaign Promise". <https://www.newyorker.com/news/our-columnists/biden-betrayed-his-promise-to-defend-human-rights-and-jamal-khashoggi>.
- Woertz, Eckart. (2020). COVID-19 in Middle East and North Africa: Reactions, Vulnerabilities, Prospects. *German Institute of Global Area and Studies*.
- Zaccara, Luciano. (2019). Iran and the Intra GCC Crisis: Risks and Opportunities. *Istituto Affari Internazionali*
- 2022 Iran Military Strength (2022, September 4). Diakses dari https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=iran
- 2022 Saudi Arabia Military Strength (2022), diakses dari https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=saudi-arabia
- 2022 Turkey Military Strength (2022). Diakses dari https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=turkey